

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL
DI SULAWESI SELATAN (1983 - 1990)**



BOSOWA

OLEH

NURLAILY JAYA

Stb/Nirm : 4586010724/871134231

**JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

PENGESAHAN

J U D U L : ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN
REGIONAL DI SULAWESI SELATAN
(1983 - 1990)

NAMA MAHASISWA : NURLAILY JAYA

NOMOR STB/NIRM : 4586010724/871134231

FAKULTAS/JURUSAN : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN

P T S : UNIVERSITAS "45"

PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

MENYETUJUI:

PENBIMBING I

PENBIMBING II

(DRS. NUHUN AHMAD, MS)

(PALIPADA PALISURI, SE)

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

KETUA/SEKERTARIS JURUSAN

(PALIPADA PALISURI, SE.)

(RUFUDDIN, SE)



HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Jumat/22 Mei 1992
Skripsi Atas Nama : NURLAILY JAYA
Nomor Stb/Nirm : 4586010724/871134231

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonom.
Universitas "45" Ujung Pandang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Study Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prop.Mr.DR.H.A.Zainal Abidin Farid (

DR.H.A.Karim Saleh

K e t u a : Drs. Palipada Palisuri

Sekretaris : Ramli Manrapi, SE

Penguji : 1. DR.M.M.Papayungan, MA

2. Drs.Nuhun Ahmad, MS

3. Dra.Laly Djohariah Siregar

4. Drs.Kahar Akil

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan kata Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis pun menyadari bahwa masa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang amat penuh suka dan duka namun semuanya itu mempunyai kesan tersendiri di dalam kehidupan penulis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Drs. Nuhun Ahmad, MS sebagai dosen pembimbing utama dan Palipada Palisuri, SE sebagai dosen pembimbing kedua yang masing-masing telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan kepada penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Palipada Palisuri, SE sebagai Dekan Fakultas Ekonomi.
- Bapak Kepala Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan
- Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

Demikian pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya saya tujukan kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dorongan dan bantuan baik be-

rupa moril maupun materil yang tak terhingga besarnya serta doa dan harapannya untuk keberhasilan penulis.

Semoga tulisan ini dapat berguna baik kita semua dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita. A m i n !

Ujung Pandang, April 1992.

P e n u l i s



DAFTAR ISI

v

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan	4
1.4. Hipotesis	5
1.5. Tata Urut Bahasan	5
BAB II : KERANGKA TEORI	
2.1. Pendapatan Regional	7
2.2. Multiplier dan Akselarator	10
2.3. Peranan Pemerintah Yang Semakin meningkat	16
BAB III : METOLOGI	
3.1. Daerah Penelitian	24
3.2. Jenis dan Sumber Data	24
3.3. Metode Pengumpulan Data	24
3.4. Metode Analisis	25

BAB IV : ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL PER-
KAPITA DI SULAWESI SELATAN

4.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bru- to	27
4.2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bru- to Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usa- ha	36
4.3. Distribusi Persentase PDRB Sulawesi Sela- tan	51

BAB V : PENUTUP

5.1. Simpulan	58
5.2. Saran - Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
----------------------	----

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Tahun 1983 - 1990	2
2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan dan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1983 - 1990	28
3. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1983 - 1990	37
4. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1983 Selama Tahun 1983 - 1990	45
5. Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1983 - 1990	52
6. Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1983, Tahun 1983 - 1990	55

DAFTAR GAMBAR

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1983, Tahun 1983 - 1990 35





B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan selama ini, dapat dikarenakan tingkat produktivitas sektor ekonomi potensial pertanian rendah, di mana sektor ini merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan sektor lain di luar sektor pertanian tersebut. Oleh karena itulah perlu digalakkan pertumbuhan sektor ekonomi yang lamban, hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong penerimaan dan pendapatan penduduk.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah dikemukakan terlebih dahulu perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan, yang merupakan seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di Wilayah Propensi Sulawesi Selatan tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dan atau dimiliki oleh penduduk wilayah ini atau tidak. Atau lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai sektor usaha, diantaranya adalah pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, restoran dan hotel, angkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, pemerintah dan jasa lainnya.

TABEL 1
 PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 SULAWESI SELATAN TAHUN 1983 - 1990

T a h u n	PDRB (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Konstan
1 9 8 3	1.749.612	1.749.612
1 9 8 4	2.002.115	1.819.386
1 9 8 5	2.312.079	1.946.552
1 9 8 6	2.609.400	2.093.890
1 9 8 7	2.870.430	2.166.830
1 9 8 8	3.299.280	2.363.170
1 9 8 9	3.735.670	2.502.520
1 9 9 0 *)	4.053.130	2.673.140

*)
 Keterangan: Angka sementara

- Perkembangan PDRB tahun 1983 - 1990 me-
 nurut harga konstan tahun 1983

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan.

Dari tabel 1 di atas dapat dikatakan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990 mengalami perkembangan yang cukup menggembarakan. Terbukti pada tahun 1983 jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku mencapai sebesar Rp. 1.749.612.000.000,- dan pada tahun 1984 mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.002.115.000.000,- tahun 1985 mencapai sebesar Rp. 2.312.079.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1986 jumlah penerimaan PDRB meningkat menjadi sebesar Rp. 2.609.400.000.000,- kemudian pada tahun 1987 jumlahnya mencapai sebesar Rp. 2.870.430.000.000,-. Pada tahun 1988 jumlah PDRB nya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 3.299.280.000.000,- tahun 1989 jumlahnya mencapai sebesar Rp. 3.735.670.000.000,- dan pada tahun 1990 tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 4.053.130.000.000,-. Selanjutnya jumlah PDRB pada tahun 1983 sesuai dengan harga konstan pada tahun 1983 mencapai sebesar Rp. 1.749.612.000.000,- pada tahun 1984 jumlah PDRB nya mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 1.819.386.000.000,- kemudian pada tahun 1985 mencapai sebesar Rp. 1.946.552.000.000,- dan pada tahun 1986 keraiikannya mencapai sebesar Rp.2.093.890.000.000,-. Jumlah PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 1987 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.166.830.000.000,- pada tahun 1988 mencapai sebesar Rp. 2.363.170.000.000,- dan pada tahun 1989 jumlah PDRB nya menjadi sebesar Rp. 2.502.520.000.000,- serta tahun 1990 jumlah PDRB terus mengalami kenaikan menjadi sebesar

Rp.2.673.140.000.000,-.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka penulis sangat menaruh perhatian untuk mengetahui secara lebih dekat mengenai perkembangan pendapatan regional di Sulawesi Selatan, dengan memilih judul "Analisis Perkembangan Pendapatan Regional di Sulawesi Selatan Tahun 1983 - 1990".

1.2. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

Sektor-sektor apa yang terutama berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan regional di Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat/mengetahui perkembangan pendapatan regional perkapita masyarakat di Sulawesi Selatan dari tahun 1983 - 1990.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran/data tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990.
2. Merupakan bahan informasi bagi pihak yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang Produk Domestik

Reonal Bruto di Sulawesi Selatan.

1.4. Hipotesis

1. Diduga bahwa, perkembangan pendapatan regional perkapita di Sulawesi Selatan selama periode 1983 - 1990 terutama masih di dominasi oleh sektor pertanian.
2. Diduga pula bahwa, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan regional di Sulawesi Selatan cenderung menurun dari tahun ke tahun sedang sektor non pertanian cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode tersebut.

1.5. Tata Urut Bahasan

Untuk memudahkan penulisan ini, maka dibuat tata urut yang akan dibahas, sebagai berikut:

- Bab I, merupakan pendahuluan yang membicarakan latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan, hipotesis, dan tata urut bahasan.
- Bab II, kerangka teori yang terdiri dari pendapatan regional, multiplier dan akselarator, dan peranan pemerintah yang semakin meningkat.
- Bab III, metodologi yang mencakup daerah penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.
- Bab IV, analisis perkembangan pendapatan regional perkapita di Sulawesi Selatan yang mencakup pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, perkembangan Produk

Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha, dan distribusi persentase PDRB Sulawesi Selatan.

Bab V, merupakan bab penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran.



B A B I I

K E R A N G K A T E O R I

2.1. Pendapatan Regional (nasional)

Pendapatan regional/nasional berguna untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah/negara (apakah sifatnya agraris atau industri), dan besarnya peranan masing-masing sektor dalam komposisi pembentukan pendapatan nasional/daerah. Melalui pendapatan nasional dapat diketahui pula tingkat kehidupan masyarakat suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pendapatan merupakan suatu yang sangat penting karena jika di tinjau secara perkapita maka pendapatan yang dimiliki seseorang perkepala yang merupakan daya beli untuk berbagai macam barang sesuai dengan kebutuhan, apakah primer, sekunder maupun tersier.

Karena pengeluaran seseorang konsumen tidak mutlak merupakan penerimaan pendapatan ada kalanya merupakan pemberian, maka dalam hal ini perlu diberikan batasan.

Defenisi yang dikemukakan BPS (Biro Pusat statistik) adalah:

"Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (Propinsi sulawesi selatan) tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dan atau dimiliki oleh penduduk di wilayah ini atau tidak.

PDRB atas dasar harga berlaku adalah:

Jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

PDRB atas dasar harga konstan (1975) adalah:

Jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga yang tetap pada tahun

(1975).

Produk Domestik Regional Netto (PDRN) adalah:

Produk Domestik Regional Bruto dikurangi nilai penyusutan barang-barang modal tetap.

Produk Domestik Regional Netto (PDRN) pada biaya faktor produksi adalah:

Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung netto.

Pendapatan Perkapita adalah:

Pendapatan Regional (dalam hal ini PDRN pada biaya faktor produksi) di bagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan Konsep PDRB yaitu:

a. Dari segi produksi adalah:

Jumlah nilai netto produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (Sulawesi Selatan) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b. Dari segi pendapatan adalah:

Jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah (Sulawesi Selatan) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

c. Dari segi pengeluaran adalah:

Jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran investasi, dan ekspor netto di wilayah (Sulawesi Selatan) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)".1)

Paul A. Samuelson menyatakan bahwa, pendapatan nasional dapat dilihat dari dua segi atau pendekatan, yaitu:

"a. Income approach, yaitu jumlah semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi selama setahun.

b. Produk approach, yaitu jumlah bersih barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama setahun".2)

1) Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan., Produk Domestik Regional Bruto 1980-1985, Ujung Pandang, Tahun 1985, hal.2.

2) Paul A. Samuelson., Economics: An Introductory Analysis, Eleventh Edition, Mc Graw-Hill Company, Inc, New York, London, Toronto, 1980, hal.169.

Begitu pula Gardner Ackley memberikan definisi sebagai berikut:

"Pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua:

- a. Upah, gaji, komisi-komisi, bonus dan lain-lain bentuk penghasilan kerja (sebelum di potong pajak atau iuran-iuran, dan jaminan sosial.
- b. Pendapatan netto dari rente dan royalty
- c. Pendapatan bunga dan,
- d. Laba, baik laba koperasi, atau laba perusahaan yang berbentuk persekutuan maupun laba perusahaan perseorangan, baik yang dibayarkan kepada pemilik maupun yang ditahan dalam perkepada pemilik maupun yang ditahan dalam perusahaan dan sebelum dipotong pajak pendapatan.

Produk nasional adalah output total dari barang-barang dan jasa sesuatu perekonomian, baik dalam periode waktu yang sedang berjalan, dinilai menurut harga pasar".³⁾

Setelah melihat konsep pendapatan/nasional tersebut di atas maka dalam proses perhitungannya, hal-hal perlu diperhatikan adalah:

- Menghindari terjadinya perhitungan ganda, seperti: roti, tepung gandum yang menjadi bahan roti tersebut, gandum yang digiling menjadi tepung dan pupuk yang dipergunakan dalam tanaman gandum, tidak boleh kita hitung sebagai output, maka yang kita perhatikan hanya roti sebagai produk akhir, sedangkan yang lain merupakan produk antara.
- Perlu dibedakan pendapatan sebagai penghasilan (earning) dan penerimaan pendapatan (income receipt).

³⁾ Gardner Ackley., Teori Ekonomi Makro, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983, hal.36-37.

Earning dapat di peroleh selama suatu periode tertentu, tapi belum tentu pendapatan ini diterimanya baik karena dikenakan pajak sebelum diterima maupun ditahan untuk sesuatu tujuan lain yang mungkin diterima dikemudian hari. Sedangkan income receipt mungkin lebih besar daripada pendapatan, baik karena lebih besarnya pembayaran penghasilan masa lampau yang ditangguhkan daripada jumlah yang kini ditangguhkan pembayarannya maupun karena adanya pembayaran transfer yang tidak merupakan pembayaran untuk jasa-jasa produksi di masa lampau ataupun masa kini.

Dan pendapatan yang semata-mata merupakan perindahan hak atas kekayaan misalnya: menjual suatu rumah, obligasi atau suatu hak cipta, maka hasil dari penjualan tersebut sudah barang tentu bukan pendapatan.⁴⁾

2.2. Multiplier dan Akselarator

Di negara-negara berkembang pendapatan masyarakat sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sebagai akibatnya kecenderungan konsumsi batas (MPC) di negara tersebut adalah lebih tinggi daripada di negara-negara maju. Dengan demikian, berdasarkan kepada teori multiplier dan akselarator, di negara-negara berkembang meningkatkan pendapatan dan menghadapi masalah pengangguran merupakan masalah mudah kalau

⁴⁾ Gardner Ackley., Op. Cit., hal.34-38.

dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi kenyataannya keadaan yang berlaku di negara-negara berkembang yang ditimbulkan oleh adanya pertambahan dalam pengeluaran adalah jauh berbeda dengan keadaan yang diramalkan dalam teori multiplier dan akselerator. Di negara berkembang pengeluaran yang berlebihan mungkin akan mengakibatkan inflasi. Walaupun dalam perekonomian tersebut masih terjadi pengangguran.

Hal ini didukung oleh pendapat Sumitro Djojohadikusumo, bahwa pertambahan pendapatan itu hanya akan menaikkan tingkat harga barang-barang di dalam negeri dan atau akan menimbulkan tekanan-tekanan pada neraca pembayaran luar negeri, karena naiknya marginal propensity to import.⁵⁾

Ini disebabkan karena:

1. Kemampuan dari perekonomian tersebut untuk menambah produksi lebih terbatas kalau dibandingkan dengan kemampuan di negara-negara maju.
2. Corak kegiatan ekonomi di negara berkembang sangat berbeda dengan negara maju, yaitu di negara berkembang sektor tradisional menguasai sebahagian besar kegiatan ekonomi.⁶⁾

Kemudian Sumitro menambahkan bahwa: Sebabnya di dalam negeri masih belum ada aparat industri, karena terlebih

⁵⁾ Sumitro Djojohadikusumo., Ekonomi Umum I, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960, hal.118-119.

⁶⁾ Sadono Sukirno., Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Bina Grafika, 1982, hal.255.

dahulu masih belum terlaksana industri yang bersifat autonomous investment. Produksi dan penawaran barang-barang dalam negeri mempunyai sifat kaku. Produksi tersebut tidak segera dapat ditambah dengan begitu saja karena belum cukup ada akumulasi modal. Akumulasi modal ini pada hakekatnya merupakan hasil daripada investasi. Selanjutnya Sumitro menyatakan: azas akselarator baru berlaku apabila sudah banyak aparat industri dan banyak skill dalam masyarakat atau lebih dahulu dalam masyarakat sudah ada industri atau barang modal.⁷⁾

Sadono Sukirno telah mengamati kesesuaian teori makro ekonomi di negara berkembang, maka dapatlah dikatakan bahwa, agar proses multiplier berjalan seperti keadaan yang diramalkan, perekonomian tersebut haruslah mempunyai beberapa sifat-sifat berikut:

1. Dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran dan para penganggur ini bukan saja terdiri dari tenaga kerja yang biasa, tetapi juga tenaga terdidik, tenaga usahawan dan tenaga kerja yang berpengalaman di bidang industri.
2. Berbagai jenis industri, terutama industri barang konsumsi masih mempunyai kelebihan kapasitas dan dapat dengan mudah memperbesar tingkat produksinya.
3. Bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh industri tersebut dapat diperoleh dengan mudah, sehingga

⁷⁾ Sumitro Djojohadikusumo., Op. Cit., hal.118.

tidak akan menjadi hambatan dalam usaha menaikkan produksi.

4. Barang-barang yang diproduksi di dalam negeri mempunyai kualitas yang sama baiknya dengan barang-barang yang di import dari luar negeri.⁸⁾

Setelah melihat multiplier dan akselator dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang, maka berikut ini dijelaskan mengenai pengertian akselator dalam multiplier.

Multiplier adalah suatu angka pelipatan yang menunjukkan beberapa besarnya perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahannya investasi.

Proses multiplier dan besarnya angka pelipat itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bila karena sesuatu atau beberapa hal investasi berubah, maka pendapatan pun berubah. Berubahnya pendapatan nasional ini akan menyebabkan perubahan konsumsi dan saving. Dalam proses kelanjutannya konsumsi ini pun akan menjadi pendapatan bagi produsen barang-barang konsumsi. Dan pendapatan ini pun akan terus mengalir. Aliran ini semakin lama akan semakin kecil dan lemah, bilamana golongan-golongan penerimaan pendapatan yang dilalui oleh arus pendapatan itu semakin banyak.

⁸⁾ Sadono Sukirno., Op. Cit., hal.258.

Proses tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut :

$$I \text{ -----} \rightarrow Y = C + S$$

$$Y_1 = C_1 + S_1$$

$$Y_2 = C_2 + S_2$$

$$Y_3 = C_3 + S_3$$

dan seterusnya

Besarnya

$$C = MPC \cdot Y$$

$$C = Y_1 = MPC \cdot Y$$

$$C_1 = MPC \cdot Y_1$$

$$= (MPC)^2 \cdot Y \text{ dan}$$

$$C_2 = (MPC)^3 \cdot Y$$

$$C_2 = Y = (MPC)^3 \cdot Y$$

Jadi dengan demikian maka Y akan makin kecil, karena MPC kurang dari satu. Untuk mengetahui efek dari penambahan investasi yang hanya sekali saja dilakukan, ialah dengan jalan menjumlahkan $Y, Y_1, Y_2, Y_3,$ dan seterusnya, dan penjumlahan ini merupakan deret ukur, sehingga jumlah

tersebut adalah : $Y \left(\frac{1}{1 - MPC} \right)$

Sedangkan akselarator terjadi apabila pendapatan bertambah, maka pengeluaran untuk barang konsumsi bertambah. Dengan bertambahnya pengeluaran konsumsi itu maka para pengusaha barang-barang konsumsi akan memperluas produksinya. Untuk perluasan produksi ini diperlukanlah pertambahan pera-



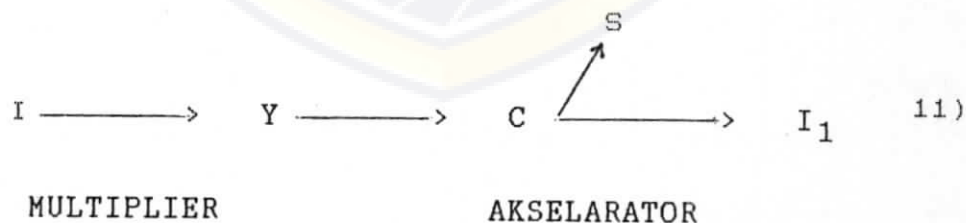
latan produksi yaitu barang-barang modal, atau dengan kata lain di butuhkan investasi baru seperti bahan-bahan mentahnya, peralatan-peralatan mesinnya, perluasan gedungnya dan sebagainya.⁹⁾

Dari proses akselarator tersebut hanyalah merupakan hubungan teknis, seperti yang dikemukakan oleh Norman F. Kaiser berikut ini:

"The acceleration principle shows the technical relation between a change in the rates of (1) current output and (2) invesment. The increase in output may an increase in the output of either consumer or capital goods. Thus, the accelaration principle is based on the technical relationship between output and capital".¹⁰⁾

Selanjutnya apabila kita menggandengkan proses multiplier dengan proses akselarator atas pendapatan nasional, maka pertambahan pendapatan nasional terasa adanya pengaruh yang komulatif. Kombinasi ini disebut dengan leverage effect.

Proses tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:



⁹⁾ Sobri., Pengantar Ekonomi Makro, Yogyakarta: BPFE UI, 1982, hal.116-125.

¹⁰⁾ Norman F. Keiser., Makro Economics, 2nd, New York: Random House, 1975, hal.138-139.

¹¹⁾ Sobri., Op. Cit., hal.126.

2.3. Peranan Pemerintah Yang Semakin Meningkat

Peranan pemerintah semakin hari semakin dibutuhkan untuk menangani ketidakefektifan atau adanya kelemahan-kelemahan dalam mekanisme pasar dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Adapun kelemahan-kelemahan dalam mekanisme pasar adalah seperti berikut ini:

1. Adanya barang-barang umum (kolektif) dimana barang dan jasa tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar dan barang tersebut disediakan untuk umum bukan secara perorangan.
2. perbedaan antara privat cost dan social cost serta private benefit dan social benefit. Misalnya: seseorang produsen swasta dalam hal-hal tertentu tidak harus membayar semua biaya yang terjadi dalam perekonomian yang timbul karena kegiatannya, dilain pihak ia mungkin sekali tidak dapat menarik keuntungan/manfaat seluruhnya dari usaha yang sama tersebut. Perbedaan ini sering disebut oleh adanya external diseconomies dan external economies.
3. Adanya resiko yang sangat besar dalam hal ini mekanisme pasar tidak mau menanggung resiko tersebut di dalam berusaha. Misalnya mendirikan sumber tenaga atom sebagai sumber tenaga listrik, diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang lama untuk memungut hasilnya. Pemanfaatan dari hasil usaha

itu tidak mungkin dimonopoli oleh orang yang mengu-
sahakannya, tetapi biasanya oleh seluruh anggota ma-
syarakat, sehingga sudah barang tentu pihak swasta
tidak mau menanggung resiko kegiatan itu.

4. Sifat monopoli artinya organisasi ini betul-betul
menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat. Misalnya: penyediaan lis-
trik, gas, telepon dan lain-lain.
5. Mekanisme pasar tidak dapat menangani adanya tekanan
inflasi atau deflasi secara otomatis, sehingga perlu
adanya campur tangan pemerintah untuk menanganinya.
6. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pab-
rik-pabrik, kemampuan pengusaha dan pengawasan seca-
ra otomatis akan menjadi lemah sehingga sampai saat
tertentu akan mengalami penurunan output dan kesem-
patan kerja, sehingga perlu adanya campur tangan pe-
merintah baik bagi perkembangan maupun pengarahannya
7. Adanya pendapatan yang tidak merata, dalam hal ini
mekanisme pasar tidak dapat mempersempit/mengurangi
perbedaan pendapatan yang semakin tajam dalam masya-
rakat. Dimana golongan kaya semakin kaya dan golong-
an miskin semakin miskin.¹²⁾

Dengan melihat kelemahan-kelemahan yang dikemukakan di

¹²⁾ M. Suparmoko., Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara, Yog-
yakarta: BPFE UGM, 1982, hal.9 - 16.

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian.

Adapun campur tangan pemerintah tersebut disebabkan karena:

1. Persoalan keadilan, dalam hal ini disebabkan bahwa pola yang dianggap adil dalam masyarakat.
2. Adanya beberapa barang yang disebut barang umum yang tidak dapat dilakukan oleh ekonomi pasar swasta.
3. Kegiatan produksi dari perusahaan dan kegiatan konsumsi dari perorangan sering tidak terlepas dari satu sama lain.
4. Ekonomi pasar tidak dapat berfungsi secara stabil, pergeseran yang tidak diduga dalam permintaan keseluruhan atau berbagai komponen dari padanya dapat terjadi, yang menyebabkan ekonomi mengalami masa inflasi atau resesi. Sejalan dengan itu tindakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menstabilkan ekonomi melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter yang sesuai.
5. Beberapa kegiatan yang tidak dapat dihasilkan dalam kondisi persaingan.
6. Tingkat pembentukan modal mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk mencapai apa yang disebut atau dianggap suatu tingkat pertumbuhan yang dapat diterima. Sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk merubahnya terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan tabungan, investasi, produktivitas, tingkat pertumbuhan dari angkatan

kerja, dan sebagainya.¹³⁾

Kemudian Richard Musgrave membagi kegiatan pemerintah dalam tiga golongan yaitu:

1. Alokasi: kegiatan ini meliputi penyediaan berbagai jasa pemerintah untuk masyarakat dan dengan demikian menyertakan alokasi sumber-sumber daya ke dalam produksi daripada jasa-jasa ini dan bukannya ke dalam keluaran sektor swasta.
2. Distribusi: kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam distribusi dari pendapatan, adalah program-program kemakmuran, struktur pajak progressif dan sebagainya.
3. Stabilisasi dan pertumbuhan: kegiatan ini ditujukan pada peningkatan stabilisasi ekonomi dengan mengurangi pengangguran dan inflasi dan dengan mempengaruhi apa bila dianggap perlu, dari tingkat pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁾

Dengan melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah.

Kemudian untuk melihat peranan pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian melalui mobilisasi dana investasi yang

¹³⁾ John F. Due dan Ann F. Friedlaender., Keuangan Negara, Terjemahan Rudy Sitompul, Jakarta: Erlangga, 1984, hal.3.

¹⁴⁾ Ibid, hal.4.

tercermin dalam pengeluarannya, sedangkan pengeluaran dibagi dua golongan yaitu pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin, dan masing-masing pengeluaran terdiri dari pos-pos penggunaan.

Pengeluaran rutin ini terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu berupa pemberian gaji, belanja barang dan pemberian subsidi pada daerah tertentu.

Sedangkan pengeluaran pembangunan terutama untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana maupun sarana berupa pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung, pembelian kendaraan dan lain-lain.

Selanjutnya untuk melihat sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat adalah sebagai berikut:

1. Adanya perang, artinya sekalipun pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut sudah selesai, maka pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara yang sudah terlanjur diangkat jadi pegawai negeri, di mana masa sebelumnya adalah pengangguran, dan tidak menjadi tanggungan pemerintah.
2. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan meningkat.
3. Adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi dan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penye-

diaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan dan kesehatan.

4. Perkembangan demokrasi. Ini memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat dan sebagainya.
5. Seringkali berkembangnya peranan pemerintah itu sendiri justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan, pemborosan dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah itu menjadi besar.
6. Untuk negara yang sedang berkembang peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin menjolok karena pemerintah bertindak sebagai penggerak pelopor pembangunan ekonomi.¹⁵⁾

Sedangkan Irving Sverdlow membagi tingkat peranan pemerintah tersebut, sebagai berikut:

1. Operation atau pelaksanaan operasi sendiri oleh pemerintah. Disini pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya pembuatan jalan dan proyek-proyek umum lainnya.
2. Direct Control atau pengendalian secara langsung. Peranan pemerintah dapat diberikan dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi melalui pengendalian langsung. Misalnya: pemberian izin, penentuan quota, tarif guna menggerakkan kegiatan masyarakat.

¹⁵⁾ M. Suparmoko., Op. Cit., hal.19 - 22.

3. Indirect Control atau pengendalian secara tidak langsung. Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam rangka mengarahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui penggunaan ketentuan kriteria yang harus merupakan aturan dan kondisi yang harus dilaksanakan dan ditaati.
4. Direct influence atau pengaruh secara langsung misalnya adalah pengaruh supaya masyarakat gemar menabung.
5. Indirect influence atau pengaruh secara tidak langsung, misalnya pemberian informasi pasaran untuk barang-barang ekspor.¹⁶⁾

Jadi peranan pemerintah dalam usaha perkembangan sosial ekonomi masyarakat semakin hari semakin bertambah, namun tidak berarti pemerintah juga tidak memberikan peluang kepada sektor swasta untuk turut serta dalam pembangunan sosial ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan peluang untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan yang paling penting adalah karena terbatasnya birokrasi pemerintah dalam melayani semua kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya campur tangan sektor swasta utamanya dalam menangani mekanisme pasar.

Salah satu peranan pemerintah dalam memberikan kesempatan pada sektor swasta dalam perkembangan ekonomi adalah

¹⁶⁾ Bintoro TjokroamiDjojo., Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1979, hal.26 - 27.

pemerintah tidak melakukan usaha yang berorientasi pada bidang-bidang yang sama dengan yang dilakukan oleh pihak swasta.



B A B I I I

M E T O D O L O G I

3.1. Daerah Penelitian

Secara umum daerah penelitian adalah Propensi Sulawesi Selatan, dan secara khusus di Kotamadya Ujung Pandang. Perlu dijelaskan bahwa Propensi Sulawesi Selatan terdiri dari dua puluh satu kabupaten dan dua kotamadya.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi, baik berupa laporan tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan sumber datanya berasal dari:

- Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
- Kantor Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang.
- Kantor Bappeda Propensi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Library Research, yaitu penelitian yang diadakan di perpustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan data yang bersifat teori, dari buku-buku, majalah-majalah yang ada hubungannya dengan materi pembahasan skripsi ini, seperti buku-buku yang menyangkut masalah pendapatan nasional/regional, dan Produk Domestik Regional Bruto.



3.3. Metode Analisis

Untuk membuktikan hipotesis di atas, maka penulis menggunakan peralatan metode analisis secara kuantitatif dan analisis kualitatif.

Analisis kuantitatif, yaitu dengan melakukan perbandingan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.

Di samping itu, melakukan perhitungan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = P_1 (1 + r)^n \quad (17)$$

Untuk memudahkan mencari nilai pertumbuhan riil PDRB tersebut rumus di atas harus ditransformasikan ke dalam logaritma sebagai berikut:

$$\log P = \log P_1 + n \log (1 + r)$$

Sehingga untuk mendapatkan nilai pertumbuhannya digunakan rumus:

$$\log (1 + r) = \frac{\log P - \log P_1}{n}$$

17) George W. Barclay., Teknik Analisa Kependudukan, Terjemahan Rozy Munir, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983, hal.57.

di mana:

P = Jumlah PDRB pada tahun akhir, yang dinyatakan dalam juta rupiah.

P_1 = Jumlah PDRB pada tahun awal, yang dinyatakan dalam juta rupiah.

r = Pertumbuhan riil PDRB dalam persen

n = Jumlah tahun yang ditinjau.



B A B IV

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA
DI SULAWESI SELATAN

4.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Di akhir Pelita III (tahun 1983) tercatat total nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku di Sulawesi Selatan sebesar Rp. 1.749.612.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 1984 menjadi Rp. 2.002.115.000.000,-. Selanjutnya bila dibandingkan dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1985, maka terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp. 2.312.079.000.000,-. Kemudian pada tahun 1986 jumlahnya mencapai sebesar Rp. 2.609.400.000.000,-. Pada tahun 1987 jumlah Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan dari tahun yang lalu menjadi Rp. 3.299.280.000.000. Dan pada awal Repelita V jumlah Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp. 3.735.670.000.000,- atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 1988. Pada akhir tahun penelitian jumlah tersebut tetap mengalami kenaikan, walaupun merupakan jumlah sementara yaitu menjadi sebesar Rp. 4.053.130.000.000,-.

Selanjutnya juga dapat dijelaskan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1983 dari tahun 1983 hingga tahun 1990 mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, walaupun kenaikannya tidak seiring dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku.

TABEL 2

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SULAWESI SELATAN DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO SELAMA TAHUN 1983 - 1990

Tahun	Sulawesi Selatan			Indonesia		
	PDRB (juta Rp)		Pertumbuhan Riil (%)	PDB (Milyar Rp)		Pertumbuhan Riil (%)
	Berlaku	Konstan		Berlaku	Konstan	
1983	1.749.612	1.749.612	-	73.697,6	73.697,6	-
1984	2.002.115	1.819.386	3,99	87.054,8	78.144,4	6,03
1985	2.312.079	1.946.552	6,99	94.491,5	79.910,8	2,26
1986	2.609.400	2.093.890	7,57	102.545,9	90.013,6	12,64
1987	2.870.430	2.166.830	3,48	124.538,9	94.302,2	4,76
1988	3.299.280	2.363.170	9,06	139.452,1	99.696,9	5,72
1989	3.735.670	2.502.520	5,90	147.106,3	110.765,7	11,10
* 1990	4.053.130	2.673.140	6,82	-	-	-
Rata - Rata			6,24	Rata - Rata		7,03

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

*

Keterangan: Angka sementara

Pada tabel 2 tersebut di atas, dapat dilihat pula data pertumbuhan riil dari Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga konstan 1983 selama tahun 1983 - 1990.

Perhitungan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = P_1 (1 + r)^n$$

di mana :

P = Jumlah PDRB pada tahun akhir, yang dinyatakan dalam juta rupiah.

P_1 = Jumlah PDRB pada tahun awal, yang dinyatakan dalam juta rupiah.

r = Pertumbuhan riil PDRB dalam persen

n = Jumlah tahun yang ditinjau.

Untuk memudahkan mencari nilai pertumbuhan riil PDRB tersebut, rumus di atas harus ditransformasikan ke dalam logaritma sebagai berikut:

$$\log P = \log P_1 + n \log (1 + r)$$

atau

$$\log (1 + r) = \frac{\log P - \log P_1}{n}$$

Dari rumus tersebut dapat digunakan untuk mencari nilai pertumbuhan riil PDRB per tahun, sebagai berikut:

- Untuk tahun 1984 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 1.819.386 - \log 1.749.612}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0169831$$

$$(1 + r) = 1,0398797$$

$$r = 3,99 \%$$

- Untuk tahun 1985 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 1.946.552 - \log 1.819.386}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0293412$$

$$(1 + r) = 1,0698951$$

$$r = 6,99 \%$$

- Untuk tahun 1986 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 2.093.890 - \log 1.946.552}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0316879$$

$$(1 + r) = 1,0756919$$

$$r = 7,57 \%$$

- Untuk tahun 1987 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 2.166.830 - \log 2.093.890}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0148709$$

$$(1 + r) = 1,0348345$$

$$r = 3,48 \%$$

- Untuk tahun 1988 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 2.363.170 - \log 2.166.830}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0376702$$

$$(1 + r) = 1,0906118$$

$$r = 9,06 \%$$

- Untuk tahun 1989 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 2.502.520 - \log 2.363.170}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0248826$$

$$(1 + r) = 1,0589674$$

$$r = 5,90 \%$$

- Untuk tahun 1990 nilai pertumbuhan riil PDRB adalah

$$\log (1 + r) = \frac{\log 2.673.140 - \log 2.502.520}{1}$$

$$\log (1 + r) = 0,0286441$$

$$(1 + r) = 1,0681792$$

$$r = 6,82 \%$$

Selanjutnya untuk melihat nilai pertumbuhan riil PDRB rata-rata per tahun selama tahun 1983 - 1990, dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus di atas sebagai berikut:

$$\log (1 + r) = \frac{\log 2.673.140 - \log 1.749.612}{7}$$

$$\log (1 + r) = 0,026297142$$

$$(1 + r) = 1,0624222$$

$$r = 6,24 \%$$

Dari nilai-nilai pertumbuhan tersebut di atas dapat dilihat secara seksama pada tabel 2 di atas.

Dari hasil perhitungan ternyata didapatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Selama tahun 1983 - 1990 mencapai angka sebesar 6,24 persen per tahun. Angka ini berada di bawah angka pertumbuhan rata-rata nasional yang mencapai sebesar 7,03 persen per tahun selama selama

tahun 1983 - 1990.

Angka pertumbuhan rata-rata yang rendah di Sulawesi Selatan selama tahun 1983 - 1990, disebabkan karena tingkat pertumbuhan yang rendah pada tahun 1987 yaitu sebesar 3,48 persen. Menurut keterangan yang didapat ini disebabkan karena pada saat itu di beberapa bagian Wilayah Sulawesi Selatan tergenam air akibat musim hujan yang panjang. Keadaan ini menyebabkan penurunan produksi di sektor pertanian, terutama untuk komoditi padi, ikan dan udang.

Menurut tabel 2 ternyata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan yang tertinggi terjadi pada tahun 1988, yaitu dengan angka pertumbuhan sebesar 9,06 persen, angka tertinggi berikutnya terjadi pada tahun 1986 dengan pertumbuhan sebesar 7,57 persen. Urutan berikutnya menunjukkan angka sebesar 6,99 persen yang terjadi pada tahun 1985, kemudian pada tahun 1990 hanya menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,82 persen. selanjutnya pada tahun 1989 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,90 persen, dan urutan selanjutnya pada tahun 1984 sebesar 3,99 persen.

Perbandingan dengan angka nasional menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1985, dengan pertumbuhan sebesar 2,26 persen untuk Produk Domestik Bruto Indonesia. Sedangkan angka pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 1986, dengan pertumbuhan sebesar 12,64 persen. Pada tahun 1984 tercatat pertumbuhan PDB nasional sebesar 6,03 persen, kemudian pada tahun 1987 sebesar 4,76 persen, tahun 1988

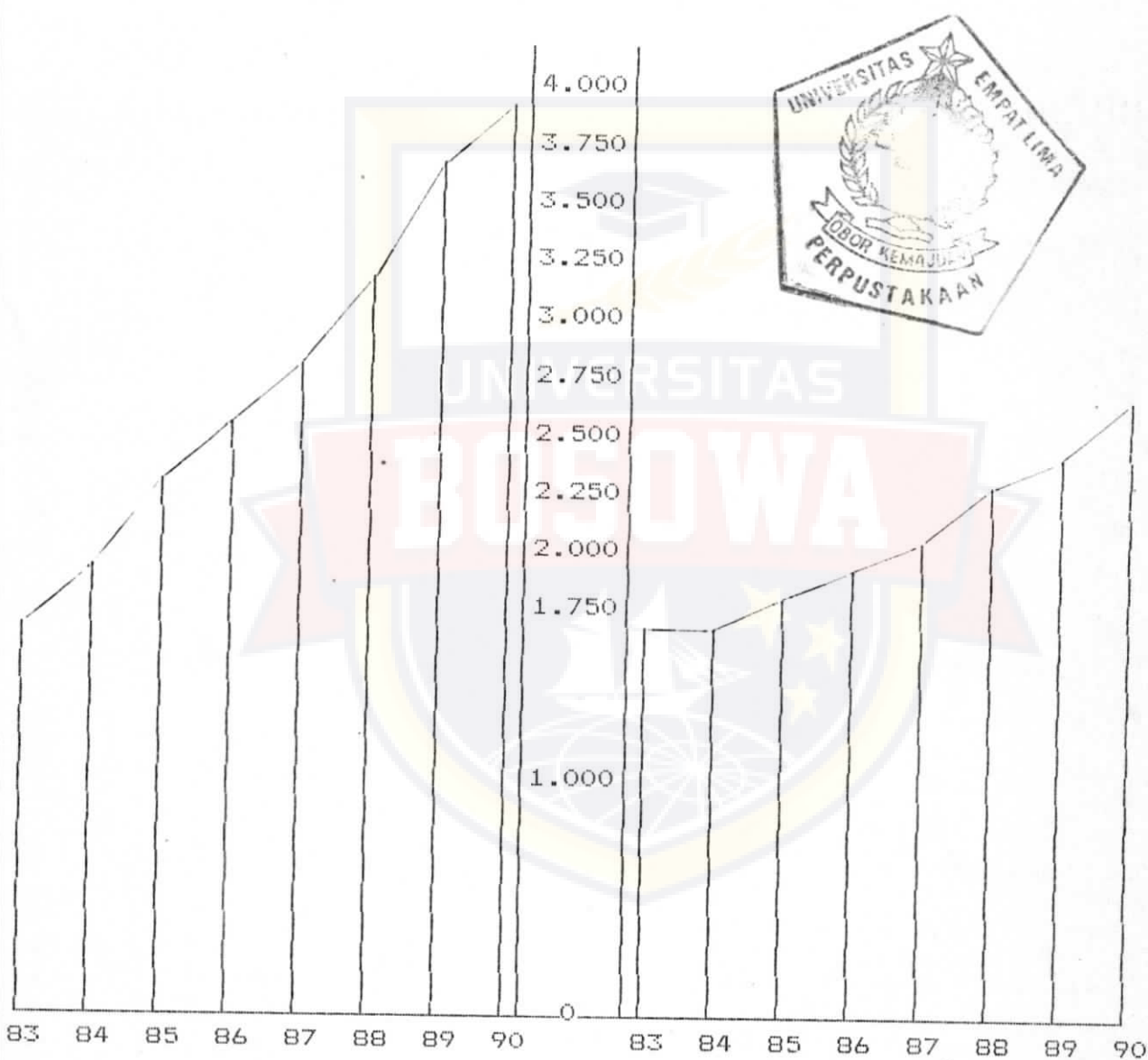
sebesar 5,72 persen dan pada tahun 1989 sebesar 11,10 persen. sehingga rata-rata selama tahun 1983 - 1989 tercatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto nasional sebesar 7,03 persen per tahun (lihat tabel 2).

Dari tabel 2 tersebut Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan dapat pula dijelaskan secara grafik, di mana grafik bahagian kiri adalah perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan grafik bahagian kiri adalah perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 1983, selama tahun 1983 - 1990.



GRAFIK 1

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 1983, TAHUN 1983 - 1990



Keterangan:



Atas Dasar Harga Berlaku



Atas Dasar Harga Konstan

4.2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha.

Penjelasan tentang perkembangan Produk Domesti Regional Bruto Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha terdiri dari dua bahagian, yaitu:

1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah, yang terdiri dari sembilan sektor lapangan usaha, yakni;

1. Sektor pertanian
2. Sektor pertambangan dan galian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air
5. Sektor bangunan
6. Sektor perdagangan, restoran dan hotel
7. Sektor angkutan dan komunikasi
8. Sektor bank dan lembaga keuangan
9. Sektor pemerintah dan jasa lain.

Pada tabel 3 tersebut dapat dijelaskan bahwa perkembangan PDRB dari setiap lapangan usaha sifatnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 1983 - 1990.

Terbukti untuk sektor pertanian, pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai Rp. 777.178.000.000,- tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 907.359.000.000,- tahun 1985 mencapai sebesar

TABEL 3

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR
HARGA BERLAKU TAHUN 1983 - 1990 (DALAM JUTA RUPIAH)

Lapangan Usaha	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	777.178	907.359	1.045.291	1.226.248
2. Pertambangan dan Galian	12.597	18.219	21.040	23.224
3. Industri Pengolahan	75.233	76.080	88.553	124.990
4. Listrik, Gas dan Air	15.572	20.021	25.664	27.921
5. Bangunan	61.061	65.870	76.992	85.327
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	317.030	380.202	458.254	505.441
7. Angkutan dan Komunikasi	171.287	181.992	197.451	217.102
8. Bank & Lemb.Keu	124.572	138.947	153.291	164.653
9. Pemerintah dan Jasa Lain	195.082	213.425	245.543	277.118
Jumlah	1.749.612	2.002.115	2.312.079	2.609.400

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan.

Lanjutan tabel 3

Lapangan Usaha	1987	1988	1989	1990
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	1.226.248	1.440.136	1.630.246	1.770.002
2. Pertambangan dan Galian	24.973	27.384	31.006	32.830
3. Industri Pengolahan	168.494	207.525	245.807	258.184
4. Listrik, Gas dan Air	34.445	39.591	45.949	50.664
5. Bangunan	105.058	120.754	140.088	153.614
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	567.484	632.142	717.249	779.822
7. Angkutan dan Komunikasi	248.292	280.109	314.170	341.679
8. Bank & Lemb.Keu	182.559	199.936	223.019	243.593
9. Pemerintah dan Jasa Lain	312.877	351.703	388.136	422.742
J u m l a h	2.870.430	3.299.280	3.735.670	4.053.130

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

Rp. 1.045.291.000.000,-. Selanjutnya PDRB pada tahun 1986 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp. 1.183.624.000.000,- tahun 1987 menjadi sebesar Rp. 1.226.248.000.000,- kemudian pada tahun 1988 kenaikannya menjadi sebesar Rp. 1.440.136.000.000,-. Pada tahun 1989 jumlah PDRB mencapai sebesar Rp. 1.630.246.000.000,- dan pada tahun 1990 jumlahnya sebesar Rp. 1.770.002.000.000,-.

Selanjutnya untuk sektor pertambangan dan galian, perkembangannya cukup menggembirakan, terbukti pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai sebesar Rp. 12.597.000.000,- tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 18.219.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 jumlah PDRB nya meningkat menjadi sebesar Rp. 21.040.000.000,-. Kemudian PDRB pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 23.224.000.000,- tahun 1987 meningkat menjadi sebesar Rp. 24.973.000.000,- tahun 1988 sebesar Rp. 27.384.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1989 jumlah Produk Domestik Regional Bruto mencapai sebesar Rp. 31.006.000.000,- dan pada tahun 1990 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 32.830.000.000,-.

Kemudian pada sektor industri pengolahan, yang mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, jumlah PDRB yang telah

dikumpulkan selama tahun 1983 - 1990 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti. Terbukti pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai sebesar Rp. 75.233.000.000,- tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 76.080.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 jumlah PDRB nya meningkat menjadi sebesar Rp. 88.553.000.000,-. Kemudian PDRB pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 124.990.000.000,-, tahun 1987 meningkat menjadi sebesar Rp. 168.494.000.000,-, tahun 1988 sebesar Rp. 207.525.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1989 jumlah Produk Domestik Regional Bruto mencapai sebesar Rp. 245.807.000.000,- dan pada tahun 1990 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 258.184.000.000,-.

Selanjutnya untuk sektor listrik, gas dan air perkembangannya pun cukup menggembirakan, terbukti pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai sebesar Rp. 15.572.000.000,- tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 20.021.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 jumlah PDRB nya meningkat menjadi sebesar Rp. 25.664.000.000,-. Kemudian PDRB pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 27.921.000.000,- tahun 1987 meningkat menjadi sebesar Rp. 34.445.000.000,- tahun 1988 sebesar Rp. 39.591.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1989 jumlah Produk Domestik Regional Bruto mencapai sebesar Rp. 45.949.000.000,- dan pada tahun

1990 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 50.664.000.000,-.

Untuk sektor bangunan jumlah PDRB nya per tahun lebih besar dari jumlah PDRB di sektor listrik, gas dan air, dan juga mengalami kenaikan dari tahun 1983 hingga tahun 1990. Terbukti pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai sebesar Rp. 61.061.000.000,- pada tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar Rp. 65.870.000.000,-. Pada tahun 1985 jumlah PDRB nya mengalami peningkatan menjadi Rp. 76.992.000.000,- selanjutnya pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 85.327.000.000,- dan pada tahun 1987 menjadi sebesar Rp. 105.058.000.000,-. Kemudian pada tahun 1988 jumlah PDRB nya tetap mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 120.754.000.000,- dan tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 140.088.000.000,- serta pada tahun 1990 PDRB nya sebesar Rp. 153.614.000.000,-.

Di Sektor perdagangan, restoran dan hotel, jumlah PDRB Sulawesi Selatan pun mengalami peningkatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990. Terbukti pada tahun 1983 jumlahnya sebesar Rp. 317.030.000.000,- Pada tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar Rp. 380.202.000.000,- pada tahun 1985 jumlah PDRB nya mengalami peningkatan menjadi Rp. 458.254.000.000,- selanjutnya pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 505.441.000.000,- dan pada tahun 1987 menjadi se-

besar Rp. 567.484.000.000,-. Kemudian pada tahun 1988 jumlah PDRB nya tetap mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 632.142.000.000,- dan tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 717.249.000.000,- serta pada tahun 1990 PDRB nya sebesar Rp. 779.822.000.000,-.

Untuk sektor angkutan dan komunikasi, yang mencakup angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, jasa penunjang angkutan, dan komunikasi, PDRB nya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terbukti pada tahun 1983 jumlahnya sebesar Rp. 171.287.000.000,-. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar Rp. 181.992.000.000,- pada tahun 1985 jumlah PDRB nya mengalami peningkatan menjadi Rp. 197.451.000.000,- selanjutnya pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 217.102.000.000,- dan pada tahun 1987 menjadi sebesar Rp. 248.292.000.000,-. Kemudian pada tahun 1988 jumlah PDRB nya tetap mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 280.109.000.000,- dan tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 314.170.000.000,- serta pada tahun 1990 PDRB nya sebesar Rp. 341.679.000.000,-.

Untuk sektor bank dan lembaga keuangan jumlah PDRB nya pada tahun 1983 sebesar Rp. 124.572.000.000, pada tahun 1984 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 138.947.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 mencapai sebesar Rp. 153.291.000.000,-. Pada tahun 1986 jumlah PDRB mengalami peningkatan menjadi sebe-

sar Rp. 164.653.000.000,- dan jika dibandingkan dengan tahun 1987, maka jumlahnya tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 182.559.000.000,-. Pada tahun 1988 jumlah PDRB mencapai Rp. 199.936.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 1989 menjadi sebesar Rp. 223.019.000.000,- dan pada akhir tahun penelitian jumlah PDRB pada sektor ini mencapai sebesar Rp. 243.593.000.000,-.

Pada sektor pemerintahan dan jasa lain, jumlah PDRB yang dapat dihasilkan selama tahun 1983 - 1990 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1983 jumlah PDRB mencapai Rp. 195.082.000.000,- pada tahun 1984 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 213.425.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1985 jumlahnya mencapai sebesar Rp. 245.543.000.000,- dan jika dibandingkan dengan tahun 1986, maka terjadi kenaikan yang besarnya menjadi Rp. 277.118.000.000,-. Pada tahun 1987 jumlah PDRB mencapai sebesar Rp. 312.877.000.000,- kemudian pada tahun 1988 jumlahnya meningkat menjadi sebesar Rp. 351.703.000.000,- selanjutnya pada tahun 1989 menjadi sebesar Rp. 388.136.000.000,- dan akhirnya pada tahun 1990 meningkat menjadi sebesar Rp. 422.742.000.000,-.

2. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1983

Setelah menjelaskan perkembangan PDRB atas dasar harga yang berlaku, maka di bawah ini akan dijelaskan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan tahun 1983.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan di Sulawesi Selatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990 cukup baik, terbukti pada tahun 1983 mencapai sebesar Rp. 1.749.612.000.000,- dan pada tahun berikutnya hingga tahun 1990 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.673.140.000.000,-. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan per sektor/lapangan usaha sebagai berikut:

Pada tabel 4 tersebut di bawah, jumlah PDRB pada sektor pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1983 jumlah PDRB nya sebesar Rp. 777.178.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 1984 menjadi sebesar Rp. 819.663.000.000,- dan tahun 1985 mencapai sebesar Rp. 870.887.000.000,-. Pada tahun 1986 jumlah PDRB tersebut meningkat menjadi sebesar Rp. 944.135.000.000,- meningkat lagi pada tahun 1987 menjadi sebesar Rp. 918.953.000.000,- dan tahun 1988 mencapai sebesar Rp. 1.027.034.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1989 jumlah PDRB meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.096.354.000.000,- dan pada akhir tahun



TABEL 4

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 1983 SELAMA TAHUN 1983 - 1990 (DALAM JUTA RUPIAH)

Lapangan Usaha	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	777.178	819.633	870.887	994.135
2. Pertambangan dan Galian	12.597	14.919	16.156	17.589
3. Industri Pengolahan	75.233	69.501	77.473	104.904
4. Listrik, Gas dan Air	15.572	17.466	19.466	20.729
5. Bangunan	61.061	62.041	67.935	73.077
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	317.030	329.309	356.803	375.225
7. Angkutan dan Komunikasi	171.287	172.842	178.499	189.288
8. Bank & Lemb.Keu	124.572	130.268	135.285	137.778
9. Pemerintah dan Jasa Lain	195.082	203.407	224.048	231.165
Jumlah	1.749.612	1.819.386	1.946.552	2.093.890

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan.

Lanjutan tabel 4.

Lapangan Usaha	1987	1988	1989	1990
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	918.953	1.027.034	1.096.354	1.168.429
2. Pertambangan dan Galian	17.985	18.669	19.770	21.652
3. Industri Pengolahan	133.693	149.589	164.416	176.160
4. Listrik, Gas dan Air	24.919	27.649	31.031	32.078
5. Bangunan	84.290	91.455	99.600	106.658
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	394.146	419.463	427.180	457.642
7. Angkutan dan Komunikasi	208.882	223.083	236.238	252.879
8. Bank & Lemb.Keu	142.794	150.061	159.411	170.814
9. Pemerintah dan Jasa Lain	241.168	256.167	268.520	286.828
Jumlah	2.166.830	2.363.170	2.502.520	2.673.140

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

penelitian mencapai sebesar Rp. 1.168.429.000.000,-.

Selanjutnya untuk sektor pertambangan dan gali-an, perkembangannya cukup menggembirakan, terbukti pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai sebesar Rp. 12.597.000.000,- tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 14.919.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 jumlah PDRB nya meningkat menjadi sebesar Rp. 16.156.000.000,-. Kemudian PDRB pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 17.589.000.000,- tahun 1987 me-ningkat menjadi sebesar Rp. 17.985.000.000,- tahun 1988 sebesar Rp. 18.669.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1989 jumlah Produk Domestik Regional Bruto men-capai sebesar Rp. 19.770.000.000,- dan pada tahun 1990 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 21.652.000.000,-.

Kemudian pada sektor industri pengolahan, yang mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, jumlah PDRB yang telah dikumpulkan selama tahun 1983 - 1990 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti. hanya saja pada tahun 1984 terjadi penurunan menjadi sebe-sar Rp. 69.501.000.000,-. Pada tahun 1983 jumlah PDRB mencapai sebesar Rp. 75.233.000.000,- selanjutnya pa-da tahun 1985 jumlah PDRB nya meningkat menjadi sebe-sar Rp. 77.473.000.000,- tahun 1986 jumlahnya menjadi sebesar Rp. 104.904.000.000,-. Pada tahun 1987 jumlah

PDRB mencapai sebesar Rp. 133.693.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 1988 menjadi sebesar Rp. 149.589.000.000,- tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 164.416.000.000,- dan pada tahun 1990 jumlah PDRB tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.176.160.000.000,-.

Selanjutnya untuk sektor listrik, gas dan air perkembangannya pun cukup menggembirakan, terbukti pada tahun 1983 jumlah PDRB nya mencapai sebesar Rp. 15.572.000.000,- tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 17.466.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 jumlah PDRB nya meningkat menjadi sebesar Rp. 19.466.000.000,-. Kemudian PDRB pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 20.729.000.000,- tahun 1987 meningkat menjadi sebesar Rp. 24.919.000.000,- tahun 1988 sebesar Rp. 27.649.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1989 jumlah Produk Domestik Regional Bruto menjadi sebesar Rp. 31.031.000.000,- dan pada tahun 1990 jumlahnya mencapai sebesar Rp. 32.078.000.000,-.

Pada sektor bangunan perkembangan PDRB nya pada tahun 1983 mencapai sebesar Rp. 61.061.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 1984 menjadi sebesar Rp. 62.041.000.000,- kemudian meningkat lagi pada tahun 1985 menjadi sebesar Rp. 67.935.000.000,- dan pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 73.077.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1987 jumlah PDRB nya mengalami

peningkatan menjadi sebesar Rp. 84.290.000.000,- kemudian pada tahun 1988 naik menjadi sebesar Rp. 91.455.000.000,- dan pada tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 99.600.000.000,- serta pada tahun 1990 PDRB Sulawesi Selatan sebesar Rp. 106.658.000.000,-.

Di Sektor perdagangan, restoran dan hotel, jumlah PDRB Sulawesi Selatan pun mengalami peningkatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990. Terbukti pada tahun 1983 jumlahnya sebesar Rp. 317.030.000.000,- Pada tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar Rp. 329.309.000.000,- pada tahun 1985 jumlah PDRB nya mengalami peningkatan menjadi Rp. 356.803.000.000,- selanjutnya pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 375.225.000.000,- dan pada tahun 1987 menjadi sebesar Rp. 394.146.000.000,-. Kemudian pada tahun 1988 jumlah PDRB nya tetap mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 419.463.000.000,- dan tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 427.180.000.000,- serta pada tahun 1990 PDRB nya sebesar Rp. 457.642.000.000,-.

Untuk sektor angkutan dan komunikasi, yang mencakup angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, jasa penunjang angkutan, dan komunikasi, PDRB nya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terbukti pada tahun 1983 jumlahnya sebesar Rp. 171.287.000.000,- Pada tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar Rp. 172.842.000.000,- pada tahun 1985 jumlah PDRB nya

mengalami peningkatan menjadi Rp. 178.499.000.000,- selanjutnya pada tahun 1986 mencapai sebesar Rp. 189.288.000.000,- dan pada tahun 1987 menjadi sebesar Rp. 208.882.000.000,-. Kemudian pada tahun 1988 jumlah PDRB nya tetap mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 223.083.000.000,- dan tahun 1989 mencapai sebesar Rp. 236.238.000.000,- serta pada tahun 1990 PDRB nya sebesar Rp. 252.879.000.000,-.

Untuk sektor bank dan lembaga keuangan jumlah PDRB nya pada tahun 1983 sebesar Rp. 124.572.000.000,- pada tahun 1984 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 130.268.000.000,- selanjutnya pada tahun 1985 mencapai sebesar Rp. 135.285.000.000,-. Pada tahun 1986 jumlah PDRB mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 137.778.000.000,- dan jika dibandingkan dengan tahun 1987, maka jumlahnya tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 142.794.000.000,-. Pada tahun 1988 jumlah PDRB mencapai Rp. 150.061.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 1989 menjadi sebesar Rp. 159.411.000.000,- dan pada akhir tahun penelitian jumlah PDRB pada sektor ini mencapai sebesar Rp. 170.814.000.000,-.

Pada sektor pemerintahan dan jasa lain, jumlah PDRB yang dapat dihasilkan selama tahun 1983 - 1990 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1983 jumlah PDRB mencapai Rp. 195.082.000.000,-

pada tahun 1984 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 203.407.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1985 jumlahnya mencapai sebesar Rp. 224.048.000.000,- dan jika dibandingkan dengan tahun 1986, maka terjadi kenaikan yang besarnya menjadi Rp. 231.165.000.000,-. Pada tahun 1987 jumlah PDRB mencapai sebesar Rp. 241.168.000.000,- kemudian pada tahun 1988 jumlahnya meningkat menjadi sebesar Rp. 256.167.000.000,- selanjutnya pada tahun 1989 menjadi sebesar Rp. 268.520.000.000,- dan akhirnya pada tahun 1990 meningkat menjadi sebesar Rp. 286.828.000.000,-.

Dari uraian tersebut di atas maka dapatlah penulis memberikan simpulan bahwa perkembangan PDRB di Sulawesi Selatan selama periode 1983 - 1990 terutama di dominasi oleh sektor pertanian, yang pada periode tersebut perkembangannya cukup baik. Dan hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada hipotesis, yang termuat pada bab satu.

4.3. Distribusi Persentase PDRB Sulawesi Selatan

Untuk melihat lebih jauh distribusi persentase PDRB di Sulawesi Selatan, maka di bawah ini akan dikemukakan pada tabel 5 dan tabel 6, berikut ini:

TABEL 5

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
SULAWESI SELATAN MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1983 - 1990 (PERSEN)

Lapangan Usaha	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	44,42	45,32	45,21	45,36
2. Pertambangan dan Galian	0,72	0,91	0,91	0,89
3. Industri Pengolahan	4,30	3,80	3,83	4,79
4. Listrik, Gas dan Air	0,89	1,00	1,41	1,07
5. Bangunan	3,49	3,29	3,33	3,27
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	18,12	18,99	19,82	19,37
7. Angkutan dan Komunikasi	9,79	9,09	8,54	8,32
8. Bank & Lemb.Keu	7,12	6,94	6,63	6,31
9. Pemerintah dan Jasa Lain	11,15	10,66	10,62	10,62
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Lanjutan Tabel 5.

Lapangan Usaha	1987	1988	1989	1990
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	42,72	43,66	43,64	43,67
2. Pertambangan dan Galian	0,87	0,83	0,83	0,81
3. Industri Pengolahan	5,87	6,29	6,58	6,37
4. Listrik, Gas dan Air	1,20	1,20	1,23	1,25
5. Bangunan	3,66	3,66	3,75	3,79
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	19,77	19,16	19,20	19,24
7. Angkutan dan Komunikasi	8,65	8,49	8,41	8,43
8. Bank & Lemb.Keu	6,36	6,06	5,97	6,01
9. Pemerintah dan Jasa Lain	10,90	10,66	10,39	10,43
J u m l a h	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

Pada tabel 5 tersebut di atas menggambarkan bahwa perkembangan distribusi persentase PDRB di Sulawesi Selatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990 berfluktuasi, walaupun perkembangan jumlah PDRB setiap sektor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Terlihat pada sektor pertanian tahun 1983 persentase PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar 44,42 persen, pada tahun 1984 mengalami peningkatan menjadi 45,32 persen, selanjutnya mengalami penurunan persentase menjadi sebesar Rp. 45,21 persen, kemudian pada tahun 1986 meningkat menjadi sebesar 45,36 persen, menurun kembali pada tahun 1987 menjadi sebesar 42,72 persen, dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,66 persen pada tahun 1988. Tahun 1989 persentase PDRB tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1988 menjadi sebesar 43,64 persen dan kembali naik pada tahun 1990 menjadi sebesar 43,67 persen.

Selanjutnya untuk sektor lainnya juga mengalami perkembangan yang sama dengan sektor pertanian tersebut di atas yang sifatnya berfluktuasi.

Kemudian untuk melihat distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga pokok tahun 1983, dapat dilihat secara jelas pada tabel 6 berikut ini, di mana perkembangannya hampir sama dengan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku.



TABEL 6

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
SULAWESI SELATAN MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 1983, TAHUN 1983 - 1990 (PERSEN)

Lapangan Usaha	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	44,42	45,05	44,74	45,09
2. Pertambangan dan Galian	0,72	0,82	0,82	0,84
3. Industri Pengolahan	4,30	3,82	3,98	5,01
4. Listrik, Gas dan Air	0,89	0,96	1,00	0,99
5. Bangunan	3,49	3,41	3,49	3,49
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	18,12	18,10	18,33	17,92
7. Angkutan dan Komunikasi	9,79	9,50	9,17	9,04
8. Bank & Lemb.Keu	7,12	7,16	6,95	6,58
9. Pemerintah dan Jasa Lain	11,15	11,18	11,51	11,04
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Lanjutan Tabel 6.

Lapangan Usaha	1987	1988	1989	1990
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	42,41	43,46	43,81	43,71
2. Pertambangan dan Galian	0,83	0,79	0,79	0,81
3. Industri Pengolahan	6,17	6,33	6,57	6,59
4. Listrik, Gas dan Air	1,15	1,17	1,24	1,20
5. Bangunan	3,89	3,87	3,98	3,99
6. Perdagangan, Rest dan Hotel	18,19	17,75	17,07	17,12
7. Angkutan dan Komunikasi	9,64	9,44	9,44	9,46
8. Bank & Lemb.Keu	6,59	6,35	6,37	6,39
9. Pemerintah dan Jasa Lain	11,13	10,84	10,73	10,73
J u m l a h	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kantor Statistik Propensi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

Pada tabel 6 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi persentase PDRB di Sulawesi Selatan utamanya atas dasar harga konstan tahun 1983 yang terdiri dari sembilan lapangan usaha/sector, yang totalnya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup baik karena dari tahun yang diteliti mengalami kenaikan walaupun terjadi fluktuasi pada distribusi persentasenya.



B A B V
P E N U T U P

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut yang telah dibahas pada bab pembahasan, maka dapatlah penulis memberikan beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990, baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1983, yang juga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan regional perkapita.
2. Pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990 bervariasi, di mana pertumbuhan tertinggi pada tahun 1988 yaitu sebesar 9,06 persen dan pertumbuhan yang terendah pada tahun 1987 yaitu sebesar 3,48 persen. Pertumbuhan riil rata-rata selama periode 1983 sampai 1990 adalah 6,24 persen.
3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang terdiri dari sembilan sektor lapangan usaha, terutama didominasi oleh sektor pertanian atau dengan kata lain pendapatan regional di Sulawesi Selatan sebahagian besar dipengaruhi oleh sektor pertanian.
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Sulawesi Selatan selama periode 1983 sampai 1990 masih cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

5.2. Saran - Saran

1. Dalam usaha untuk lebih meningkatkan pendapatan regional yang telah dicapai maka usaha untuk meningkatkan produktivitas di segala sektor perlu diberi perhatian, untuk itu diharapkan pemerintah dapat memberikan fasilitas pada berbagai sektor yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu unsur utama untuk peningkatan produktivitas di samping faktor-faktor lain.
2. Di Sektor industri yang memperlihatkan kontribusi yang masih relatif rendah dari tahun ke tahun selama periode 1983 sampai 1990 dalam menuju era industrialisasi perlu diberi perhatian yang serius untuk meningkatkan pertumbuhannya, industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja perlu diberi bimbingan dan penyuluhan yang lebih intensif guna meningkatkan produktivitasnya.
3. Prosedur perizinan kepada pihak swasta yang ingin mengembangkan usahanya di Sulawesi Selatan supaya lebih disederhanakan atau lebih dipermudah sehingga dapat menarik pengusaha-pengusaha lainnya di luar Sulawesi Selatan untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

1. Abdurraman., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
2. Ackley, Gardner., Teori Ekonomi Makro, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
3. Boediono., Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Ilmu Ekonomi No.4, Yogyakarta: BPFE UGM, 1982.
4. Dernburg, T.F dan Mc. Dougall., Ekonomi Makro, Jakarta: Erlangga, 1982.
5. Dornbusch, R dan S. Fisher., Makro Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1986.
6. Esmara, Hendra., Teori Ekonomi dan Kebijakanaksanaan Pembangunan, Kumpulan Seri untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
7. Hansen, Alvin H., Teori Moneter dan Kebijakanaksanaan Fiskal, Jakarta: Bharata, 1966.
8. Samuelson, Paul, A., Economic, Elevent Edition, Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha, Ltd, 1980.
9. Sobri, H., Pengantar Ekonomi Makro, Yogyakarta: BPFE UI, 1982.
10. Soelistyo., Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Jakarta: Karunika UT, 1985.
11. Sudrajat, M., Menenal Ekonometrika Pemula, Bandung: Armico, 1984.
12. Tadang Ambar., Ekonomi Pembangunan, Problema Dasar dan Teori Pembangunan, Cetakan Pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981.
13. Tjokroamidjojo, Bintoro., Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

II. LAPORAN-LAPORAN

14. Kantor Statistik Prpensi Sulawesi Selatan., Produk Domestik Regional Bruto 1980-1985, Ujung Pandang.